

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN
DI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG.**

Achmad Suharyo, Siti Khomiyati

ABSTRACT

Problem Formulation In this study, namely (1) How the Implementation of Family Hope Program Policy in Tackling Poverty in Kemiling District Bandar Lampung City. (2) What aspects support and hinder the implementation of the Family Hope Program Policy in Tackling Poverty in Kemiling District, Bandar Lampung City.

The research method used is qualitative descriptive analysis method. The use of this method is to describe the Implementation of the Family Hope Program Policy in Reducing Poverty in the Kemiling District of Bandar Lampung City, assessing qualitatively, how all data is obtained directly from informants in the field using interviews and observation.

The results showed that the Implementation of the Family Hope Program Policy in Reducing Poverty in the Kemiling District of Bandar Lampung City, had been carried out through the dimensions of (1) Communication, the Family Hope Program, had been socialized, although there were still people who wanted better service. (2) Human resources, executors / assistants are relatively lacking, (3) Disposition / attitude of implementers, which have not been optimal in implementing policies, (4) Bureaucratic structure, which seems to lack the function of each structure, so it does not run optimally.

Aspects that hinder, namely (1) Aspects of Communication aspects that are still relatively weak, which is characterized by a lack of socialization of the implementation of the Family Hope Program, (2) Lack of Human Resources, Implementers / Companion of the Family Hope Program, requires a relatively large quantity or number of implementers / assistants to manage the family hope program, which so far the number of implementers / assistants assigned to manage the family hope program is relatively small so that it cannot supervise well and reach out to the community get a family of hope program, (3) Relatively lack of supervision of the implementation of the family of hope program in Kemiling District so that the existing problems are not immediately responded by the executor / assistant or the government.

Keywords: Implementation, Policy, Family, Hope.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan belum mampu mencapai tujuan optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini adalah akibat suatu kebijakan dilaksanakan sebagai hasil perencanaan dari atas (*top down*), yang menganggap bahwa pihak-pihak perencana tersebut lebih tahu sehingga masyarakat sebagai sasaran program kurang atau bahkan sama sekali tidak diikutsertakan dalam merumuskannya. Dampaknya masyarakat sebagai sasaran tidak punya rasa memiliki. Di samping itu, kebijakan yang diturunkan kurang dibarengi dengan upaya-upaya tindak lanjut. Akibatnya tujuan yang telah dirumuskan oleh suatu kebijakan tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, sejak pemerintah telah melakukan perubahan orientasi perencanaan pembangunan dari yang bersifat dipaksakan dari atas (*top down*) dengan pelaksanaan yang lebih mengakomodir kepentingan masyarakat (*bottom up*) mulai dirasakan masyarakat, bahwa kebutuhannya mulai terpenuhi. Di dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik khususnya yang menyangkut penanggulangan masalah kemiskinan dan pembangunan masyarakat yang mengalami ketertinggalan ini lebih banyak diwarnai oleh keterlibatan masyarakat serta lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pembangunan masyarakat (*stakeholder*).

Upaya penanggulangan kemiskinan harus selalu ditumbuhkan, didorong, dan dikembangkan secara bertahap, ajeg dan berkelanjutan. Selanjutnya yang terpenting adalah adanya perubahan pandangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Perasaan masa bodoh terhadap upaya pemerintah menjadi perasaan memiliki dan membutuhkan. Program pembangunan yang orientasinya mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia, sebaiknya tidak terlalu diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan belaka, namun bagaimana menciptakan program-program yang menyentuh aspek manusia. Penciptaan kondisi demikian pada hakekatnya merupakan pembangunan yang berpusat pada manusia (*human development*). Kebijakan pengentasan golongan penduduk miskin seyogyanya ditujukan untuk pembangunan manusia agar mereka mampu meningkatkan jangkauan pilihannya secara luas.

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan suatu implementasi kebijakan/ program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang dimasa depan, Implementasi kebijakan/program tersebut diperlukan untuk mendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti Kebijakan Inpres Desa Tertinggal (IDT) atau yang baru berjalan seperti Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sasarannya di pedesaan. Kebijakan Program P2KP yang dilaksanakan di perkotaan ini menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Implementasi kebijakan tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang kini kita alami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang mendukung bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang (Tim Persiapan P2KP, 1999).

Kemiskinan pada hakekatnya terjadi karena adanya ketimpangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas disatu pihak dan adanya keterbatasan-keterbatasan pada pihak lain, baik yang bertalian dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri.

Dalam hal ini Wignyosoebroto (1996:1) mengatakan : “.....kemiskinan pada hakekatnya adalah keadaan berkurangnya sumber daya alam yang diperlukan seseorang atau sekelompok orang untuk melestarikan hidupnya secara layak”.

Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk tunai yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Dana bantuan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat dalam program keluarga Harapan (PKH) merupakan dana hibah yang disalurkan langsung kepada masyarakat miskin melalui Kebijakan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam proses penyeleksiannya dilakukan oleh petugas dari BPS, yang berkoordinasi dengan petugas Kecamatan, pihak Desa dan Kelurahan, sedangkan Kabupaten dan Kota, dan Propinsi hanya sebagai pengawas fasilitator dan pengawas, Dana tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat miskin.

Data mengenai masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung tahun 2016 yaitu 541 Kepala Keluarga (KK) yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian setelah pendataan kembali pada tahun 2017 sebanyak 653 KK, menunjukkan adanya selisih sebanyak 112 KK, data tersebut menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang timbul pada uraian sebelumnya dan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan, ternyata pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung, belum berjalan secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan sehingga menarik minat peneliti mengadakan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hal tersebut.

Disamping itu hasil kajian literatur, sampai saat ini penulis belum menemukan hasil penelitian yang mengangkat masalah implementasi Program Keluarga Harapan. Oleh sebab itu, identifikasi masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah : merujuk pendapat Edward III (1980:9-10) yaitu, Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- 1) Belum efektifnya pelaksanaan komunikasi yang ditandai dengan kurangnya sosialisasi implementasi program keluarga harapan (PKH), sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi yang jelas tentang implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung.
- 2) Minimnya sumber daya dalam implementasi program keluarga harapan (PKH) baik SDM sebagai pelaksana maupun sumber daya pendukung lainnya, seperti pendamping, mengakibatkan tidak optimalnya implementasi program keluarga harapan (PKH). Hal ini ditandai dengan pendataan masyarakat miskin yang kurang sesuai dengan harapan oleh

masyarakat, kemudian pembagian bantuan implementasi program keluarga harapan (PKH) mengalami berbagai kendala.

- 3) Disposisi atau sikap dan perilaku para pejabat pelaksana yang menunjukkan masih minimnya kesungguhan para pejabat pelaksana dalam mengimplementasikan Kebijakan.
 - 4) Dari Aspek struktur birokrasi meliputi struktur organisasi pelaksana yang sangat hirarkhis, tumpang tindih tugas dan kewenangan serta antar sektor dan antar level dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk setiap pelaksana sebagian besar belum terpenuhi;
- Keempat faktor tersebut, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, merupakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III.

Dari berbagai permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Dari fenomena tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?; (2) Aspek-aspek apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, sebagian besar pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat atau pejabat lapangan dalam memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah.

Menurut Edward III, (1980) bahwa dalam implementasi kebijakan ada empat syarat yang harus dipenuhi antara lain : (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) sumber daya, dan (4) struktur birokrasi. Selanjutnya, untuk memperjelas masing-masing variabel tersebut

Dengan demikian, mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik itu menyangkut usaha mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

2. Konsep Kemiskinan

Meskipun kemiskinan pada hakekatnya terjadi karena adanya ketimpangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas disatu pihak dan adanya keterbatasan-keterbatasan pada pihak lain, baik yang bertalian dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri.

Bebagai konsep kemiskinan telah dikembangkan, dan kemiskinan menurut Effendi (1993) dapat diidentifikasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi politik. Perumusan konsep kemiskinan dipengaruhi oleh pemahaman tentang dimensi tersebut, karena itu dikenal kemiskinan sosial atau kemiskinan kebudayaan, kemiskinan ekonomi dan kemiskinan politik.

Golongan penduduk miskin menunjukkan sifat-sifat antara lain: lemah dalam kemampuan berusaha, terbatas akses terhadap kegiatan ekonomi, terbatas dalam sikap dan tingkah lakunya, lemah kemaunnya untuk maju, rendahnya sumber daya manusia, partisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian ini maka menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, Locke, Spriduso dan Silferman (dalam Creswell, 1994:147)

mengemukakan bahwa *qualitative research is interpretative research. As such, the biases, values and judgement of the researches become stated explicitly in the research report. Such openness is considering to be useful and positive.* Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara kualitatif, bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, menemukan proses pelaksanaan masyarakat dalam menerima bantuan pemerintah. Seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan obsevasi.

Menurut Strauss and Carbin (dalam Sukidin, 2003:1) penelitian kaulitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

Kemudian menurut Moleong, (1995:3) metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.

Melalui pendekatan kualitatif, kajian tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, akan mampu memberikan informasi yang akurat sehingga sangat membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh.

Melalui proses ini diharapkan muncul proposisi hipotetik baru melalui interpretasi interaksi antara atribut dan propretise yang selanjutnya digunakan untuk membangun kategori dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, aktivitas penelitian ini dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan. Melalui desain ini dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomenal tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, secara utuh dan multidimensional sehingga dapat dilakukan kategorisasi dan perumusan hipotesis sebagai temuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling.

Mengacu pada Kebijakan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi acuan oleh setiap birokrasi publik dalam melaksanakan kebijakan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Edward III ada empat syarat yang harus dipenuhi antara lain : (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) sumber daya, dan (4) struktur birokrasi yaitu:

a. Dimensi Komunikasi

Komunikasi sering dihubungkan dengan kata Latin *communis* yang artinya sama. Komunikasi hanya terjadi bila kita memiliki makna yang sama. Pada gilirannya, makna yang sama hanya terbentuk bila kita memiliki pengalaman yang sama. Kesamaan makna karena kesamaan pengalaman masa lalu atau kesamaan struktur kognitif disebut *isomorfisme*. *Isomorfisme* terjadi bila komunikasi-komunikasi berasal dari budaya yang sama, status sosial yang sama, pendidikan yang sama, ideologi yang sama; pendeknya mempunyai sejumlah maksimal pengalaman yang sama. Pada kenyataannya tidak ada *isomorfisme* total.

Dalam perspektif komunikasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Dalam pelaksanaan komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain meliputi arus komunikasi vertikal dan horisontal.

Ketika kita berkomunikasi, kita menterjemahkan gagasan kita ke dalam bentuk lambang (verbal atau nonverbal). Proses ini lazim disebut penyandian (*encoding*). Bahasa adalah alat penyandian, tetapi alat yang tidak begitu baik (lihat keterbatasan bahasa di atas), untuk itu diperlukan kecermatan dalam berbicara, bagaimana mencocokkan kata dengan keadaan sebenarnya, bagaimana menghilangkan kebiasaan berbahasa yang menyebabkan kerancuan dan kesalahpahaman. Pada dimensi komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling, dilekukan sebagai sosialisasi dalam penyempaian tahapan pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam pelaksanaan sosialisasi program Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa semakin banyak pelaksanaan kegiatan aktivitas organisasi, maka semakin banyak pula informasi yang harus disalurkan pada unit-unit organisasi, berjalan tidaknya suatu proses administrasi dapat dilihat

dari lancar tidak arus informasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada para bawahan, atau karyawan dengan karyawan yang lain. Untuk mengefektifkan komunikasi dalam organisasi maka dapat meminimalkan paktor pengganggu yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Komunikasi yang efektif penting bagi pimpinan adalah karena tiga alasan utama (Stoner dan Freman. 1992) yaitu (1) Komunikasi sebagai alat dalam proses manajemen, yaitu dalam perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan; (2) Keterampilan komunikasi yang efektif membuat manajer menggunakan berbagai bakat yang tersedia dalam dunia multi budaya dari organisasi dan (3) Ternyata sebagian besar waktu dari aktivitas manajer digunakan untuk berkomunikasi. Dengan demikian bahwa komunikasi dalam organisasi sangat penting dalam melaksanakan setiap kegiatan.

Untuk mengefektifkan seluruh kegiatan yang diimplementasikan, maka disyaratkan kepada seluruh pelaksana kegiatan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada pelaksana-pelaksana yang tepat sebelum dilaksanakan melalui saluran komunikasi. Komunikasi semacam itu harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksananya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan isi kebijakan tersebut.

b. Dimensi Sumber Daya

Dalam proses implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, dukungan sumber daya memegang peranan penting, sejak proses perencanaan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan serta memegang kendali pada pengawasan kebijakannya. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia ini, maka pemerintah harus memfokuskan perhatian pada penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pelaksana kebijakan, dengan kata lain pelaksana kebijakan haruslah sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya, utamanya pelaksana pendampingan terhadap program Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Untuk mensukseskan implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, maka perlu pengembangan kemampuan pegawai yang merupakan program terpadu, yakni di satu pihak supaya dapat membantu para pegawai untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya masing-masing baik melalui pelatihan, lokakarya maupun bentuk lain, di lain untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Di samping itu organisasi yang memberi kesempatan semacam ini terhadap para pegawainya serta menindaklanjuti dengan melakukan promosi yang besar.

c. Dimensi Disposisi/Sikap

Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap implementor/disposisi pada dasarnya menyangkut pemahaman program, kewenangan, kesempatan berkembang, dan komitmen para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan. Atas dasar tersebut terdapat tiga kemungkinan sikap implementor yaitu: *pertama*, melaksanakan program kebijakan; *kedua*, menolak program kebijakan (terang-terangan atau tersembunyi); dan *ketiga* bersikap netral, dalam arti ikut mengerjakan jika program itu memberi manfaat. Dengan demikian bahwa sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan yang objek.

Namun dari hasil wawancara dengan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), di Kecamatan Kemiling bahwa, pada prinsipnya pelaksana sudah berupaya melaksanakan program Keluarga Harapan (PKH), di Kecamatan Kemiling, secara maksimal sesuai dengan fasilitas yang tersedia atau yang disediakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diimplementasikan sampai masyarakat, maka perlu persiapan secara komprehensif yang dimulai dari kebijakannya itu sendiri, kemudian sikap dan perilaku sumber daya manusianya dalam hal ini adalah pelaksana penerima Program Keluarga Harapan (PKH), di Kecamatan Kemiling, yang harus benar-benar siap, fasilitas pendukung juga yang harus memadai sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana, serta waktu pelaksanaannya yang perlu diperhitungkan dengan sangat hati-hati sehingga program yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang ditentukan.

Sesuai hasil penelitian bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), di Kecamatan Kemiling, telah dilaksanakan, dalam pelaksanaannya pelaksana telah bersikap dengan baik dan sopan, walaupun masih ada yang sering terlambat dalam pelaksanaan pelayanan, namun hal tersebut pelaksana tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), di Kecamatan Kemiling.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti

rantai komando, dengan struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi, dibagi, dan dikelompokkan secara formal.

Dengan demikian bahwa Struktur Birokrasi, mempunyai dampak terhadap penerapan sebuah kebijakan, dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi yang umum, yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta fragmentasi dalam pertanggungjawaban di antara berbagai unit organisasi. Walaupun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih dapat terhambat oleh inefisiensi struktur birokratis, demikian juga sebaliknya struktur birokrasi yang sederhana dapat lebih efisien dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Sesuai hasil penelitian tersebut bahwa kekuatan utama birokrasi adalah terletak pada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien. Menyatukan beberapa kekhususan dalam departemen-departemen fungsional menghasilkan skala ekonomi, duplikasi yang minim pada personel dan peralatan, dan karyawan memiliki kesempatan untuk berbicara “dengan bahasa yang sama” di antara rekan-rekan sejawat mereka.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, telah dilaksanakan melalui dimensi yaitu, (1) Komunikasi, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), telah disosialisasikan, walaupun masih ada masyarakat yang menginginkan pelayanan lebih baik. (2) Sumber Daya manusia, pelaksana/pendamping yang relative kurang, (3) Disposisi/sikap pelaksana, yang belum optimal dalam melaksanakan kebijakan, (4) Struktur birokrasi, yang nampak kurangnya fungsi masing-masing struktur, sehingga tidak berjalan optimal.
2. Aspek-aspek yang menghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, yaitu (1) Aspek Pada Aspek komunikasi yang masih relative lemah, yang ditandai dengan kurangnya sosialisasi implementasi program keluarga harapan (PKH), (2) Minimnya Sumber daya manusia, Pelaksana/pendamping program

keluarga harapan (PKH), memerlukan kuantitas atau jumlah pelaksana/pendamping yang relatif banyak untuk mengelola program keluarga harapan (PKH), yang mana selama ini jumlah pelaksana/pendamping yang bertugas untuk mengelola program keluarga harapan (PKH), relatif sedikit sehingga tidak dapat mengawasi dengan baik dan menjangkau masyarakat yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH), (3) Relatif kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kemiling sehingga permasalahan yang ada tidak langsung direspon oleh pelaksana/pendamping maupun pemerintah.

Adapun Implikasi yang dikemukakan dari penelitian ini adalah :

1. Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, perlu mensosialisasikan program tersebut baik melalui sosialisasi langsung kemasayarakat maupun melalui pengumuman, poster dan baleho, sehingga masyarakat dapat mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Perlu penambahan sumber daya manusia dalam hal ini pelaksana/pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar pengawasan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat terlaksana sesuai sasaran kebijakan, dan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L., 2006. *Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Austin, Ia Patrick, 2001. *Pragmatism and Public Policy in East Asia*, Singapore : Fairmont.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, edisi ke 2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bellone, Carl, J. 1980. *Organizational Theory and The New Public Administration, Allyne and Bacon Inc.*
- Departemen Sosial R.I., 2002. *Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta.
- Dunn, William N., 2000. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Alih Bahasa: Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Hamindita Offset.
- Dye, Thomas R., 1987. *Understanding Public Policy*, New Jensey: Prentice Hall, Inc.
- Edwards III, George, C., 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Grindle, Merilee., 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*, New Jersey, Princeton University Press.
- Guilford, 1956. *Fundamental Statistic in Psychology and Education*, McGraw-Hill, Tokyo.
- Hamidjojo, S.S., 1978. *Pembangunan Desa dan Swadaya Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press.

- Jones, Charles O., 1995. *Kebijakan Publik (Public Policy)* Editor Natsir Budiman, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Talidziduhu, 1997. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Bandung; Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan IIP-Unpad.
- Parasuraman, Zeithaml Berry, 1988. *ServQual: A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perception Of Service Quality*, Journal of retailing.
- Nugroho, R., 2003 *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Pribadi, Tigin, 2005. *Pengaruh Kompetensi BKM Dalam Menseleksi KSM Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Modal Program P2KP di Desa Pangalengan dan Sukamanah di Kabupaten Bandung*. Pascasarjana, Unpad.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen

- Anonimus. 1999. *Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)*, Buku Satu Pedoman Umum. Jakarta.
- Anonimus. 2013. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan IPKH*, Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
- BPS. 2017, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*, Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- UU Nomor 11 tahun 2010, tentang kesejahteraan Sosial..
- Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.